

LINGKUNGAN

Rehabilitasi 5.000 Hektar Mangrove

BALIKPAPAN, KOMPAS — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menargetkan rehabilitasi 5.000 hektar kawasan mangrove di Kalimantan Timur pada 2021. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah maraknya tambak rakyat di hutan mangrove. Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk edukasi tambak rakyat ramah lingkungan.

Hal itu menjadi pembahasan dalam Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Kaltim 2021 yang diselenggarakan BRGM secara daring, Rabu (7/7/2021). Data yang dihimpun BRGM menunjukkan, total kerusakan mangrove di Kaltim mencapai 17.879 hektar. Lahan kritis seluas 9.084 hektar berada di dalam kawasan dan sisanya 8.795 hektar berada di luar kawasan mangrove.

"Kawasan kritis itu akibat penebangan liar, pembukaan mangrove untuk tambak, per-

tanian, kebun, dan sejumlah penyebab lain," ujar Kepala Kelompok Kerja Program dan Anggaran BRGM Teguh Prio Adi Sulistyio.

Ia menjelaskan, pemerintah mengucurkan dana Rp 1,5 triliun untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove tahun anggaran 2021. Sebagian besar anggaran untuk penanaman mangrove, yakni Rp 1,4 triliun. Khusus untuk persemaian mangrove modern di Kaltim, pemerintah mengalokasikan Rp 10,5 miliar.

Seluruh program akan dilaksanakan dengan skema padat karya atau dengan melibatkan banyak sumber daya manusia. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian warga dalam rehabilitasi lingkungan ini.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau sudah melakukan orientasi lapangan sejak Mei

2021. Salah satu perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kaltim itu juga rampung melakukan sosialisasi kepada warga sekitar kawasan.

"Penanaman (mangrove) baru mencapai 20 hektar. Saat ini kami sedang proses penyediaan bahan, seperti ajir dan benih atau bibit," kata Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung BPDASHL Mahakam Berau Selly Oktashariyany Ayub.

Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM Muhammad Yusuf menjelaskan, kawasan mangrove di Kaltim banyak yang beralih fungsi menjadi tambak warga. Dalam program penghijauan ini, pemilik tambak perlu diyakinkan bahwa penghijauan ini tidak akan merusak tambak warga.

Program rehabilitasi diharapkan ikut mendorong kesejahteraan masyarakat. (CIP)